



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

# **MANAGEMENT RISIKO** **SEKRETARIAT DPRD**


TAHUN 2023



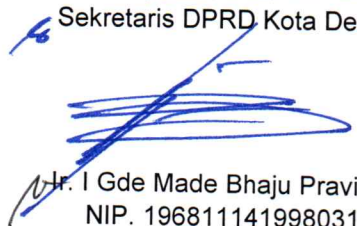
**Form 2.b**  
**Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2023	
Periode yang Dinilai	:	Periode RPJMD 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	:	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	
Sumber Data	Renstra Tahun 2021-2026		
Tujuan Strategis	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD		
Sasaran Strategis	Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD		
IKU Renstra OPD	No		Target
	1	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD	100%
Program	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%
	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	100%
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan strategis: 1. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD		
	Sasaran Strategis: 1. Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD		
	IKU Strategis: 1. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan		
	Program: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		


Denpasar, 5 Januari 2023  
Sekretaris DPRD Kota Denpasar

  
Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM  
NIP. 196811141998031003

**Form 2.c.1**  
**Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2023		
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
OPD yang Dinilai	: Sekretariat DPRD Kota Denpasar		
Sumber Data	Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023		
Tujuan Strategis	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD		
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100%
	2	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100%
	3	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100%
	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	5	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%
	6	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100%
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program:		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan:		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>4. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</li> <li>5. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</li> <li>6. Layanan Administrasi DPRD</li> </ol>
	Keluaran/Hasil Kegiatan:		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan</li> <li>2. Persentase Penatausahaan Administrasi Umum</li> <li>3. Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor</li> <li>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>5. Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</li> <li>6. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD</li> </ol>
<p>Denpasar, 5 Januari 2023</p> <p>Sekretaris DPRD Kota Denpasar</p>  <p>I. I Gde Made Bhaju Pravita, MM NIP. 196811141998031003</p>			

**Form 2.c.2**  
**Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD**

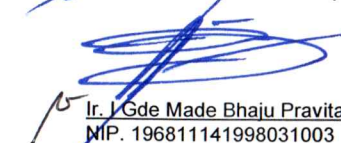
Nama Pemda	: Pemerintah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	: 2023	
Periode yang Dinilai	: Periode RPJMD 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
OPD yang Dinilai	: Sekretariat DPRD Kota Denpasar	
Sumber Data	Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023	
Tujuan Strategis	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD	
Program	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Target
	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	
	1	100%
	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
	2	100%
	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	
	3	100%
	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	
4	100%	
Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD		
5	100%	
Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
6	100%	
Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		
7	100%	
Persentase Fasilitasi Tugas DPRD		
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	
	Kegiatan: 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4. Peningkatan Kapasitas DPRD 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 7. Fasilitasi Tugas DPRD	
	Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD 2. Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran 3. Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 4. Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD 5. Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 7. Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	
<p>Denpasar, 5 Januari 2023</p> <p>Sekretaris DPRD Kota Denpasar</p>  <p>Dr. I Gde Made Bhaju Pravita, MM NIP. 196811141998031003</p>		

**Form 3.b**  
**Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar  
 Nama OPD : Sekretariat DPRD Kota Denpasar  
 Tahun Penilaian : 2023  
 Periode yang dinilai : Periode RENSTRA 2021-2026  
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD  
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD								
	Sasaran Strategis : Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan								
	Program :									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Layanan kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	RSO.23.34.03.01	Sekretaris DPRD	Kurangnya inovasi dan kreatifitas SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	Internal	C	Belum optimalnya pemenuhan layanan administrasi kesekretariatan	Sekretariat DPRD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD  Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	Kepuasan layanan kesekretariatan tidak mencapai target	RSO.23.34.03.02	Sekretaris DPRD	Kurangnya inovasi dan kreatifitas SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	Internal	C	Belum optimalnya pelaksanaan dukungan tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD

Denpasar, 5 Januari 2023  
 Sekretaris DPRD Kota Denpasar

  
 Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM  
 M.P. 196811141998031003

Form 3.c  
Identifikasi Risiko Operasional OPD


Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar  
 Nama OPD : Sekretariat DPRD Kota Denpasar  
 Tahun Penilaian : 2023  
 Periode yang dinilai : 1 Januari - 31 Desember 2023  
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD  
 Sasaran Strategis OPD : Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD  
 Unsur Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
Program:											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											
Kegiatan:											
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	Perencanaan	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak sesuai kebutuhan	ROO.23.34.03.01	Kabag Umum dan Keuangan	Perhitungan gaji dan tunjangan ASN belum cermat	Internal	C	Anggaran yang tersedia melebihi / kurang dari kebutuhan	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.01	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	Pelaksanaan	Tidak tepat waktunya realisasi pengadaan barang/jasa untuk operasional kantor	ROO.23.34.03.02	Kabag Umum dan Keuangan	Terbatasnya kompetensi SDM yang memahami proses pengadaan barang/jasa per unit organisasi	Internal	C	Realisasi fisik pengadaan tidak mencapai target	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.02	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	Pelaksanaan	Peningkatan biaya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ROO.23.34.03.03	Kabag Umum dan Keuangan	Tidak terkontrolnya pemakaian sumber daya jasa penunjang kantor	Internal	C	Tertundanya pembayaran tagihan air, listrik dan telepon akibat anggaran tidak tersedia	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.03	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan	Peningkatan kebutuhan belanja pemeliharaan BMD	ROO.23.34.03.04	Kabag Umum dan Keuangan	Pemeliharaan BMD tidak dilaksanakan secara berkala	Internal	C	Tertunda dan terhambatnya pelaksanaan pemeliharaan BMD	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.04	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pelaksanaan	Terlambatnya penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD serta pelaksanaan Medical Check Up DPRD	ROO.23.34.03.05	Kabag Umum dan Keuangan	Padatnya jadwal kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Eksternal	UC	Belum optimalnya fasilitasi penyediaan hak keuangan dan kesejahteraan DPRD	Sekretariat DPRD

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.05	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
6	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	Pelaksanaan	Keterlambatan penyusunan Risalah Rapat	ROO.23.34.03.06	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam menyusun risalah rapat	Internal	C	Belum optimalnya kinerja tim penyusun risalah rapat tepat waktu	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.06	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
<b>Program:</b>											
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD											
<b>Kegiatan:</b>											
7	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Pelaksanaan	Keterlambatan pembahasan Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda oleh Bapemperda	ROO.23.34.03.07	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Adanya dinamika/perubahan peraturan yang lebih tinggi	Eksternal	UC	Tidak tercapai target Propemperda terhadap Ranperda yang diregistrasi	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.07	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
8	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pelaksanaan	Fasilitasi penyediaan bahan/materi rapat pembahasan kebijakan anggaran tidak tersedia secara tepat waktu	ROO.23.34.03.08	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Materi hasil evaluasi Gubernur disampaikan ke DPRD tetapi tidak sesuai jadwal yang ditetapkan	Eksternal	UC	Belum optimalnya fasilitasi rapat pembahasan kebijakan anggaran	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.08	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
9	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Pelaksanaan	Belum optimalnya kompetensi SDM dalam memfasilitasi perumusan materi kunjungan kerja AKD (Komisi)	ROO.23.34.03.09	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Belum adanya kebutuhan dari DPRD untuk perekrutan kelompok pakar dan tim ahli untuk AKD (Komisi)	Eksternal	UC	Belum optimalnya fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.09	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
10	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	Pelaksanaan	Tidak tercapainya indeks kepuasan DPRD dalam pelaksanaan Bimtek DPRD	ROO.23.34.03.10	Kabag Umum dan Keuangan	Terbatasnya kompetensi SDM memfasilitasi Bimtek DPRD	Internal	C	Belum optimalnya fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.10	Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
11	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan	Lamanya penyampaian laporan hasil kegiatan Reses oleh DPRD	ROO.23.34.03.11	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Belum cermatnya SDM yang bertugas memfasilitasi administrasi pertanggungjawaban kegiatan Reses dengan SOP yang tersedia	Internal	C	Keterlambatan proses fasilitasi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban reses	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.11	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
12	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan	Pengaduan permasalahan kode etik DPRD tidak terekam dengan baik	ROO.23.34.03.12	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Penyampaian pengaduan dilakukan secara lisan dan tidak membutuhkan tindak lanjut oleh Badan Kehormatan	Eksternal	UC	Belum optimalnya penerapan pengaduan masyarakat menggunakan sistem informasi	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.12	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD
13	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	Pelaksanaan	Pimpinan DPRD tidak dapat menghadiri undangan yang diterima	ROO.23.34.03.13	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Kurangnya koordinasi terkait jadwal Pimpinan DPRD	Internal	C	Belum optimalnya fasilitas tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD
			Pertanggungjawaban	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.13	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD

Denpasar, 5 Januari 2023  
Sekretaris DPRD Kota Denpasar

  
I Gde Made Bhaju Pravita, MM  
NIP. 196811141998031003

**FORM 4**  
**Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda : Pemerintah Kota Denpasar  
 Tahun Penilaian : 2023  
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD  
 Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

**Analisis Risiko**

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	<b>Risiko Strategis Pemda</b>				
	-				
II	<b>Risiko Strategis OPD : Sekretariat DPRD</b>				
1	Layanan kesekretariatan tidak terselesaikan tepat waktu	RSO.23.34.03.01	2	1	2
2	Kepuasan layanan kesekretariatan tidak mencapai target	RSO.23.34.03.02	2	2	4
III	<b>Risiko Operasional OPD : Sekretariat DPRD</b>				
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak sesuai kebutuhan	ROO.23.34.03.01	2	1	2
2	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.01	2	1	2
3	Tidak tepat waktunya realisasi pengadaan barang/jasa untuk operasional kantor	ROO.23.34.03.02	2	1	2
4	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.02	2	1	2
5	Peningkatan biaya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ROO.23.34.03.03	2	1	2
6	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.03	2	1	2
7	Peningkatan kebutuhan belanja pemeliharaan BMD	ROO.23.34.03.04	3	3	9
8	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.04	3	3	9
9	Terlambatnya penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD serta pelaksanaan Medical Check Up DPRD	ROO.23.34.03.05	1	2	2
10	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.05	2	1	2
11	Keterlambatan penyusunan Risalah Rapat	ROO.23.34.03.06	1	2	2
12	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.06	2	1	2
13	Keterlambatan pembahasan Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda oleh Bapemperda	ROO.23.34.03.07	1	2	2
14	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.07	2	1	2
15	Fasilitasi penyediaan bahan/materi rapat pembahasan kebijakan anggaran tidak tersedia secara tepat waktu	ROO.23.34.03.08	1	2	2

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Resiko
a	b	c	d	e	f=dxe
16	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.08	2	1	2
17	Belum optimalnya kompetensi SDM dalam memfasilitasi perumusan materi kunjungan kerja AKD (Komisi)	ROO.23.34.03.09	1	2	2
18	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.09	2	1	2
19	Tidak tercapainya indeks kepuasan DPRD dalam pelaksanaan Bimtek DPRD	ROO.23.34.03.10	1	2	2
20	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.10	2	1	2
21	Lamanya penyampaian laporan hasil kegiatan Reses oleh DPRD	ROO.23.34.03.11	1	2	2
22	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.11	2	1	2
23	Pengaduan permasalahan kode etik DPRD tidak terekam dengan baik	ROO.23.34.03.12	1	2	2
24	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.12	2	1	2
25	Pimpinan DPRD tidak dapat menghadiri undangan yang diterima	ROO.23.34.03.13	1	2	2
26	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.13	2	1	2


Denpasar, 5 Januari 2023  
 Sekretaris DPRD Kota Denpasar

  
 Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM  
 NIP. 196811141998031003

**Form 5**  
**Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD				
Urusan Pemerintahan		: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	<b>Risiko Strategis Pemda</b>					
	-					
II	<b>Risiko Strategis OPD : Sekretariat DPRD</b>					
1	Kepuasan layanan kesekretariatan tidak mencapai target	RSO.23.34.03.02	4	Sekretaris DPRD	Kurangnya inovasi dan kreatifitas SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	Belum optimalnya pelaksanaan dukungan tugas dan fungsi DPRD
III	<b>Risiko Operasional OPD : Sekretariat DPRD</b>					
1	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.01	2	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara
2		RF.23.34.03.02	2	Kabag Umum dan Keuangan		
3		RF.23.34.03.03	2	Kabag Umum dan Keuangan		
4		RF.23.34.03.04	9	Kabag Umum dan Keuangan		
5		RF.23.34.03.05	2	Kabag Umum dan Keuangan		
6		RF.23.34.03.06	2	Kabag Umum dan Keuangan		
7		RF.23.34.03.07	2	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan		
8		RF.23.34.03.08	2	Kabag Umum dan Keuangan		
9		RF.23.34.03.09	2	Kabag Umum dan Keuangan		
10		RF.23.34.03.10	2	Kabag Umum dan Keuangan  dan Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		
11		RF.23.34.03.11	2	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		
12		RF.23.34.03.12	2	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan		
13		RF.23.34.03.13	2	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan		

Denpasar, 5 Januari 2023  
Sekretaris DPRD Kota Denpasar

  
Gde Made Bhaiu Pravita, MM  
NIP. 196811141998031003

**Form 7**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**  
**(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda		: Pemerintah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD					
Urusan Pemerintahan		: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I Risiko Strategis Pemda</b>							
-							
<b>II Risiko Strategis OPD</b>							
1	Kepuasan layanan kesekretariatan tidak mencapai target	RSO.23.34.03.02	Standar Pelayanan Minimal dan Maklumat Pelayanan	Laporan Evaluasi Kinerja belum optimal dipergunakan sebagai pedoman rencana aksi pada periode selanjutnya	Pelaksanaan peningkatan kompetensi, kapasitas dan keterampilan pegawai dengan cara mengikuti pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, konsultasi dan studi banding sesuai dengan kompetensinya	Sekretaris DPRD	TW IV 2023
<b>III Risiko Operasional OPD</b>							
1	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.01 ; RF.23.34.03.02 ; RF.23.34.03.03 ; RF.23.34.03.04 ; RF.23.34.03.05 ; RF.23.34.03.06 ; RF.23.34.03.07 ; RF.23.34.03.08 ; RF.23.34.03.09 ; RF.23.34.03.10 ; RF.23.34.03.11 ; RF.23.34.03.12 ; RP.23.34.03.13	1) Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2) Surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal percepatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal dan pemanfaatan toko daring	Belum optimalnya penggunaan SPSE dalam proses pengadaan barang./ jasa	Melakukan pengadaan barang/jasa dengan metode e-purchasing/ pengadaan melalui SPSE	Kabag Umum dan Keuangan;  Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan;  Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	TW IV 2023


Denpasar, 5 Januari 2023  
 Sekretaris DPRD Kota Denpasar

  
Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM  
 NIP. 196811141998031003

**Form 8**  
**Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian atas Pengendalian yang Dibangun**

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar : 2023 : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I Risiko Strategis Pemda</b>							
<b>II Risiko Strategis OPD</b>							
1	Pelaksanaan peningkatan kompetensi, kapasitas dan keterampilan pegawai dengan cara mengikuti pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, konsultasi dan studi banding sesuai dengan kompetensinya	Laporan dan Rapat	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	TW I 2023	TW IV 2023	
<b>III Risiko Operasional OPD</b>							
1	Melakukan pengadaan barang/jasa dengan metode e-purchasing/ pengadaan melalui SPSE	Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban	Kabag Umum dan Keuangan;  Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan;  Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Sekretariat DPRD	TW I 2023	TW IV 2023	

Denpasar, 5 Januari 2023  
 Sekretaris DPRD Kota Denpasar

  
 Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM  
 NIP. 196811141998031003

**Form 9**  
**Rencana dan Realisasi Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan**

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kota Denpasar : 2023 : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
<b>I Risiko Strategis OPD</b>						
1	Pelaksanaan peningkatan kompetensi, kapasitas dan keterampilan pegawai dengan cara mengikuti pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, konsultasi dan studi banding sesuai dengan kompetensinya	Konfirmasi Pelaksanaan Laporan dan Pemantauan berkelanjutan	Sekretaris DPRD	TW I 2023	TW IV 2023	Telah dilaksanakan, ditindaklanjuti, dan dokumentasi berupa notulen / laporan
<b>II Risiko Operasional OPD</b>						
1	Melakukan pengadaan barang/jasa dengan metode e-purchasing/ pengadaan melalui SPSE	Konfirmasi Pelaksanaan Laporan dan Pemantauan berkelanjutan	Kabag Umum dan Keuangan;  Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan;  Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	TW I 2023	TW IV 2023	Telah dilaksanakan, ditindaklanjuti, dan dokumentasi berupa notulen / laporan

Denpasar, 5 Januari 2023  
 Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Dr. I Gde Made Bhaju Pravita, MM  
 NIP. 196811141998031003

KERTAS KERJA PPBR INSPEKTORAT KOTA DENPASAR  
HASIL EVALUASI REGISTER RISIKO TAHUN 2023

SEBELUM EVALUASI

No	Nama OPD	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan DPA 2022	Pagu Anggaran RKA 2023	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak			Nilai Risiko	Existing Control (Pengendalian yang sudah ada)	Rencana Tindak Pengendalian (Rencana Mitigasi)	Status Risiko		
								Jenis Risiko	Nama Risiko	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U/C	Uraian	Pihak yang Terkena					Skala Dampak	Skala Kemungkinan
1	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	57.124.139.307	60.084.047.526	Meningkatnya Pelayanan Keskretariatian DPRD	Pemenuhan fasilitas penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatian		Layanan kesekretariatian tidak terselesaikan tepat waktu	RSO.23.3 4.03.01	Sekretaris DPRD	Kurangnya inovasi dan kreatifitas SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	Internal	C	Belum optimalnya pemenuhan layanan administrasi kesekretariatian	Sekretariat DPRD	2,00	1,00	2,00	Penjadwalan proses pengadaan tercantum dalam penetapan RUP	Penerapan sistem informasi yang terintegrasi dan dievaluasi secara berkala	Sangat Rendah
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.166.056				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja keuangan sebagai alat penilaian dan evaluasi Sekretariat DPRD		Adanya kelidakkurasi antara perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan	ROO.22.3 4.03.01	Kabag Umum dan Keuangan	Lemahnya koordinasi internal	Internal	C	Tidak optimalnya evaluasi dan pencapaian target kinerja	Sekretariat DPRD	1,00	1,00	1,00	1. Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPJ. 2. SOP Penyusunan Renja dan Renstra	Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam proses penyusunan anggaran dengan dasar pertimbangan history anggaran tahun-tahun sebelumnya	Sangat Rendah
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.012.457.198	7.563.542.505			Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak sesuai kebutuhan	ROO.23.3 4.03.01	Kabag Umum dan Keuangan	Perhitungan gaji dan tunjangan ASN belum cermat	Internal	C	Anggaran yang tersedia melebihi / kurang dari kebutuhan	Sekretariat DPRD	2,00	1,00	2,00	Rekonsiliasi gaji secara berkala	Melakukan rekonsiliasi gaji dan tunjangan ASN secara berkala	Sangat Rendah
1.3								Kerugian Keuangan Negara	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34. 03.01	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD	2,00	1,00	2,00	SOP kenaikan gaji berkala dan SOP naik pangkat	Melakukan rekonsiliasi gaji	Sangat Rendah
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.149.048.770	3.357.890.782			Persentase Penatausahaan Administrasi Umum		Tidak tepat waktunya realisasi pengadaan barang/jasa untuk operasional kantor	ROO.23.3 4.03.02	Kabag Umum dan Keuangan	Terbatasnya kompetensi SDM yang memahami proses pengadaan barang/jasa per unit organisasi	Internal	C	Realisasi fisik pengadaan tidak mencapai target	Sekretariat DPRD	2,00	1,00	2,00	1. Postingan Anggaran Kas 2. Jadwal pengadaan sesuai RUP 3. Laporan Tepra per bulan	Penetapan Keputusan Sekretaris DPRD tentang Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa dengan penjabaran tugas dan tanggung jawabnya	Sangat Rendah
1.5								Kerugian Keuangan Negara	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34. 03.02	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD	2,00	1,00	2,00	1) Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2) Surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal percepatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal dan pemanfaatan toko daring	Melakukan pengadaan barang/jasa dengan metode e-purchasing/pengadaan melalui SPSE	Sangat Rendah
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.407.637.749	2.441.241.568			Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor		Peningkatan biaya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ROO.23.3 4.03.03	Kabag Umum dan Keuangan	Tidak terkontrolnya pemakaian sumber daya jasa penunjang kantor	Internal	C	Tertundanya pembayaran tagihan air, listrik dan telpon akibat anggaran tidak	Sekretariat DPRD	2,00	1,00	2,00	N/A	Pencatatan pemakaian dilakukan secara berkala oleh pelaksana kegiatan dan penerbitan pelugas cs untuk penghematan energi	Sangat Rendah
1.7								Kerugian Keuangan Negara	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34. 03.03	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD	2,00	1,00	2,00	SOP terkait verifikasi pembayaran	Optimalisasi proses verifikasi bukti pembayaran sesuai dengan SOP verifikasi	Sangat Rendah

KERTAS KERJA FPBR INSPEKTORAT KOTA DENPASAR  
HASIL EVALUASI REGISTER RISIKO TAHUN 2023

No	Nama OPD	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan DPA 2022	Pagu Anggaran RKA 2023	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab			Dampak			Existing Control (Pengendalian yang sudah ada)	Rencana Tindak Pengendalian (Rencana Mitigasi)	Status Risiko		
								Jenis Risiko	Nama Risiko	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak				Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.162.932.000	1.704.270.290			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Peningkatan kebutuhan belanja pemeliharaan BMD	ROO.23.34.03.04	Kabag Umum dan Keuangan	Pemeliharaan BMD tidak dilaksanakan secara berkala	Internal	C	Tertunda dan terhambatnya pelaksanaan pemeliharaan BMD	Sekretariat DPRD	3,00	3,00	9,00	Kartu Pemeliharaan BMD	Pengoptimalan pencatatan pemeliharaan dengan menggunakan teknologi informasi	Sangat Rendah
1.9							Kerugian Keuangan Negara	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.04	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD	3,00	3,00	9,00	1) Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2) Surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal percepatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal dan pemanfaatan toko daring	Melakukan pengadaan barang/jasa dengan metode e-purchasing/ pengadaan melalui SPSE	Sangat Rendah	
1.10	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		282.476.000				Persentase pencapaian pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Tidak optimalnya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	ROO.23.34.03.06	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Kualitas SDM yang belum memadai untuk melaksanakan kegiatan keprotokoleraan	Internal	C	kuualitas pelayanan keprotokoleraan tidak optimal	Sekretariat DPRD	2,00	1,00	2,00	N/A	Mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang rentang kendali pelaksanaan tugas-tugas	Sangat Rendah	
1.11	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		43.820.930.034	44.771.480.951			Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlambatnya penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD serta pelaksanaan Medical Check Up DPRD	ROO.23.34.03.05	Kabag Umum dan Keuangan	Padatnya jadwal kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Eksternal	UC	Belum optimalnya fasilitas penyediaan hak keuangan dan kesejahteraan DPRD	Sekretariat DPRD	1,00	2,00	2,00	Penjadwalan proses pengadaan tercantum dalam penetapan RUP	Pengoptimalan time schedule proses pengadaan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan jadwal pelaksanaan dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD	Sangat Rendah	
1.12							Kerugian Keuangan Negara	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.05	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD	2,00	1,00	2,00	1) Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2) Surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal percepatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal dan pemanfaatan toko daring	Melakukan pengadaan barang/jasa dengan metode e-purchasing/ pengadaan melalui SPSE	Sangat Rendah	
1.13	Layanan Administrasi DPRD		267.491.500	245.621.430			Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	Keterlambatan penyusunan Risalah Rapat	ROO.23.34.03.06	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam menyusun risalah rapat	Internal	C	Belum optimalnya kinerja tim penyusun risalah rapat tepat waktu	Sekretariat DPRD	1,00	2,00	2,00	N/A	Peningkatan kompetensi penyusun risalah rapat	Sangat Rendah	
1.14							Kerugian Keuangan Negara	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.06	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD	2,00	1,00	2,00	1) Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2) Surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal percepatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal dan pemanfaatan toko daring	Melakukan pengadaan barang/jasa dengan metode e-purchasing/ pengadaan melalui SPSE	Sangat Rendah	

KERTAS KERJA PPBR INSPEKTORAT KOTA DENPASAR  
HASIL EVALUASI REGISTER RISIKO TAHUN 2023

No	Nama OPD	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan DPA 2022	Pagu Anggaran RKA 2023	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI										Existing Control (Pengendalian yang sudah ada)	Rencana Tindak Pengendalian (Rencana Mitigasi)	Status Risiko
								Risiko			Sebab			Dampak		Skala				
Jenis Risiko	Nama Risiko	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan										
2	Sekretariat DPRD Kota Denpasar	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	22.874.984.540	33.358.321.160	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD	Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD  Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	RSO.23.34.03.02	Sekretaris DPRD	Kurangnya inovasi dan kreatifitas SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	Internal	C	Belum optimalnya pelaksanaan dukungan tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	2,00	2,00	4,00	Evaluasi kinerja secara berkala	Pelaksanaan peningkatan kompetensi, kapasitas dan keterampilan pegawai dengan cara mengikuti pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, konsultasi dan studi banding sesuai dengan kompetensinya	Sangat Rendah
2.1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.705.452.300	2.738.996.480			Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	ROO.23.34.03.07	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Adanya dinamika/perubahan peraturan yang lebih tinggi	Eksternal	UC	Tidak tercapai target Propempera terhadap Ranperda yang diregistasi	Sekretariat DPRD	1,00	2,00	2,00	SOP Pembahasan Ranperda	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Bapempera, Bagian Hukum Sekda dan OPD Teknis	Sangat Rendah
2.2																				
2.3		Pembahasan Kebijakan Anggaran	947.676.000	714.922.000			Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	ROO.23.34.03.08	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Materi hasil evaluasi Gubernur disampaikan ke DPRD tetapi tidak sesuai jadwal yang ditetapkan	Eksternal	UC	Belum optimalnya fasilitasi rapat pembahasan kebijakan anggaran	Sekretariat DPRD	1,00	2,00	2,00	Jadwal penyusunan APBD yang diatur dalam Permendagri	Pencermatan penjadwalan rapat memperdomani Permendagri terkait Pedoman Penyusunan APBD	Sangat Rendah
2.4																				
2.5		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	10.316.047.000	12.681.513.000			Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	ROO.23.34.03.09	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Belum adanya kebutuhan dari DPRD untuk perekrutan kelompok pakar dan tim ahli untuk AKD (Komisi)	Eksternal	UC	Belum optimalnya fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Sekretariat DPRD	1,00	2,00	2,00	SOP Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Inventarisasi administrasi fasilitasi pengawasan pemerintahan dalam rangka penetapan materi kunjungan kerja	Sangat Rendah

KERTAS KERJA PPBR INSPEKTORAT KOTA DENPASAR  
HASIL EVALUASI REGISTER RISIKO TAHUN 2023  
SEBELUM EVALUASI

No	Nama OPD	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan DPA 2022	Pagu Anggaran RKA 2023	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak			Existing Control (Pengendalian yang sudah ada)	Rencana Tindak Pengendalian (Rencana Mitigasi)	Status Risiko			
								Jenis Risiko	Nama Risiko	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U/C	Uraian	Pihak yang Terkena				Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
2.6								Kerugian Keuangan Negara	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.09	Kabag Umum dan Keuangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD	2,00	1,00	2,00	1) Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2) Surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal percepatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal dan pemanfaatan toko daring	Melakukan pengadaan barang/jasa dengan metode e-purchasing/ pengadaan melalui SPSE	Sangat Rendah
2.7		Peningkatan Kapasitas DPRD	4.250.439.000	4.671.767.400			Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD		Tidak tercapainya indeks kepuasan DPRD dalam pelaksanaan Bimtek DPRD	ROO.23.34.03.10	Kabag Umum dan Keuangan	Terbatasnya kompetensi SDM memfasilitasi Bimtek DPRD	Internal	C	Belum optimalnya fasilitas peningkatan kapasitas DPRD	Sekretariat DPRD	1,00	2,00	2,00	SOP Bimtek DPRD	Pembuatan time schedule dan job desk serta pembinaan SDM yang melaksanakan fasilitasi teknis Bimtek DPRD	Sangat Rendah
2.8								Kerugian Keuangan Negara	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.10	Kabag Umum dan Keuangan dan Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD	2,00	1,00	2,00	1) Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2) Surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal percepatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal dan pemanfaatan toko daring	Melakukan pengadaan barang/jasa dengan metode e-purchasing/ pengadaan melalui SPSE	Sangat Rendah
2.9		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.515.934.440	3.492.500.000			Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Lamanya penyampaian laporan hasil kegiatan Reses oleh DPRD	ROO.23.34.03.11	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Belum cermatnya SDM yang bertugas memfasilitasi administrasi pertanggungjawaban kegiatan Reses dengan SOP yang tersedia	Internal	C	Keterlambatan proses fasilitasi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kegiatan reses	Sekretariat DPRD	1,00	2,00	2,00	SOP Pelaksanaan Reses	Pembuatan time schedule mulai dari proses perencanaan administrasi sd pertanggungjawaban kegiatan reses dan disampaikan kepada DPRD	Sangat Rendah
2.10								Kerugian Keuangan Negara	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.11	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD	2,00	1,00	2,00	1) Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2) Surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal percepatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal dan pemanfaatan toko daring	Melakukan pengadaan barang/jasa dengan metode e-purchasing/ pengadaan melalui SPSE	Sangat Rendah
2.11		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	251.984.000	192.518.000			Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Pengaduan permasalahan kode etik DPRD tidak terekam dengan baik	ROO.23.34.03.12	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Penyampaian pengaduan dilakukan secara lisan dan tidak membutuhkan tindak lanjut oleh Badan Kehormatan	Eksternal	UC	Belum optimalnya penerapan pengaduan masyarakat menggunakan sistem informasi	Sekretariat DPRD	1,00	2,00	2,00	SPM Layanan pengaduan masyarakat secara online melalui website	Pengoptimalan publikasi ramasita kepada masyarakat dan penyediaan sarana prasarana yang memadai untuk mengakses ramasita	Sangat Rendah

KERTAS KERJA PPBR INSPEKTORAT KOTA DENPASAR  
HASIL EVALUASI REGISTER RISIKO TAHUN 2023  
SEBELUM EVALUASI

No	Nama OPD	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan DPA 2022	Pagu Anggaran RKA 2023	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Existing Control (Pengendalian yang sudah ada)	Rencana Tindak Pengendalian (Rencana Mitigasi)	Status Risiko
								Jenis Risiko	Nama Risiko	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena						
2.12								Kerugian Keuangan Negara	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.12	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD	2,00	1,00	2,00	1) Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2) Surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal percepatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal dan pemanfaatan toko daring	Melakukan pengadaan barang/jasa dengan metode e-purchasing/ pengadaan melalui SPSE	Sangat Rendah
2.13		Fasilitasi Tugas DPRD	887.451.800	8.866.104.280			Persentase Fasilitasi Tugas DPRD		Pimpinan DPRD tidak dapat menghadiri undangan yang diterima	ROO.23.34.03.13	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Kurangnya koordinasi terkait jadwal Pimpinan DPRD	Internal	C	Belum optimalnya fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	1,00	2,00	2,00	N/A	Koordinasi dengan Bagian Prokopim Sekda untuk penjadwalan Pimpinan DPRD secara berkala	Sangat Rendah
2.14								Kerugian Keuangan Negara	Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.23.34.03.13	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1. Lemahnya pengawasan 2. Lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Sekretariat DPRD	2,00	1,00	2,00	1) Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2) Surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal percepatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal dan pemanfaatan toko daring	Melakukan pengadaan barang/jasa dengan metode e-purchasing/ pengadaan melalui SPSE	Sangat Rendah
TOTAL PAGU			79.999.123.847	93.442.368.686																		

Keterangan Jenis Risiko

1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan Dalam Jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
7. Gratifikasi

Status Risiko


1. Rendah
2. Sedang
3. Tinggi
4. Sangat Tinggi

Keterangan:

Risiko Kecurangan diisi hanya pada kegiatan yang memiliki potensi risiko kecurangan

Nama risiko : jenis risiko ditambah penjelasan  
Skenario Risiko : dijelaskan siapa dg siapa

Denpasar, 5 Januari 2023  
Sekretaris DPRD Kota Denpasar

  
I. Gde Made Bhaju Pravita, MM  
NIP. 19681114 199803 1 003